

**HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA
DENGAN NEGARA-NEGARA PASIFIK SELATAN**



Skripsi

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

YUMNA SANI ANSHARI G

E131 12 112

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2016

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA DENGAN NEGARA-
NEGARA PASIFIK SELATAN

N A M A : YUMNA SANI ANSHARI G.

N I M : E 131 12 112

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 22 Agustus 2016

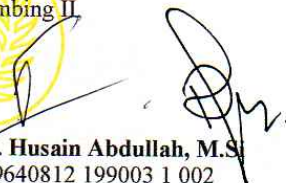
Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Patrice Lumumba, MA
NIP. 19611012 198701 1 001



Drs. H. Husain Abdullah, M.S.
NIP. 19640812 199003 1 002

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional.



H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 19620102 199002 1 003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA DENGAN NEGARA-
NEGARA PASIFIK SELATAN

N A M A : YUMNA SANI ANSHARI G.

N I M : E 131 12 112

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Selasa, 16 Agustus 2016

TIM EVALUASI

Ketua : Drs. Patrice Lumumba, MA

Sekretaris : Burhanuddin, S.IP, M.Si

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

2. Agussalim, S.IP, MIRAP

3. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si



Handwritten signatures of the evaluation team members, including the Chairman, Secretary, and three members, positioned to the right of their respective names.

ABSTRAKSI

Yumna Sani Anshari, E 13112112, dengan skripsi berjudul “Hubungan Kerjasama Indonesia dan Negara-negara Pasifik Selatan”, dibawah bimbingan Patrice Lumumba selaku Pembimbing I dan Husein Abdullah selaku Pembimbing II, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang mengapa Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan mengadakan hubungan kerjasama ekonomi & politik serta bentuk implementasi dari hubungan kerjasama Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan. Indonesia dan kawasan Pasifik Selatan yang berdekatan secara geografis dan memiliki kesamaan sumber daya alam di bidang perikanan dan kelautan menjadikan kedua aktor tersebut saling bekerja sama dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama ini bergerak di bidang ekonomi dan politik,

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitik yang kemudian didukung oleh data-data kuantitatif. Dalam metode ini dijelaskan secara sistematis mengenai data-data ataupun variabel-variabel yang berkaitan dengan latar belakang hubungan kerjasama Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan dan perwujudan hubungan kerjasama Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan. Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan substansi permasalahan yang akan dibahas berupa buku, dokumen, jurnal, artikel, atau surat kabar serta melakukan wawancara. Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa yang bersifat analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur kemudian dihubungkan antara data-data yang ada kemudian permasalahan yang ada dijelaskan dan dianalisa berdasarkan data-data yang ada dan disusun dalam suatu tulisan serta ditarik suatu kesimpulan akhir dari data-data yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang hubungan kerjasama Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan didasari oleh kebutuhan dan kepentingan masing-masing tiap negara. Indonesia banyak memberi bantuan berupa kerjasama teknis seperti capacity building di bidang ekonomi dan good governance di bidang politik kepada negara-negara Pasifik Selatan (Fiji, Vanuatu, Papua Nugini), sebab negara-negara di Pasifik Selatan minim akan kemajuan pembangunan negaranya yang disebabkan oleh kapasitas sumber daya manusia yang kurang, demografi yang jumlahnya sedikit, serta akses yang sulit dijangkau. Adapun tujuan utama selain membantu pembangunan negara demi menjaga kestabilan kawasan, manfaat yang Indonesia dapatkan adalah meredam dukungan-dukungan ketiga negara tersebut dalam upaya kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Kesamaan etnis Melanesia yang membuat negara-negara di Pasifik Selatan yang dimana atas nama solidaritas mendukung penuh separatism Papua Barat. Isu ini juga sudah menjadi isu internasional yang mengkhawatirkan Indonesia terhadap ancaman kedaulatan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Kata Kunci: *Kerjasama, Indonesia, Pasifik Selatan, Melanesia, Isu Papua Barat.*

ABSTRACTION

Yumna Sani Anshari, E 13112112, with a thesis titled "Cooperative relations of Indonesia and the South Pacific states", under the guidance of Patrice Lumumba as Supervisor I and Hussein Abdullah as Advisor II, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of Hasanuddin.

This research aims to find out the background of why Indonesia and the South Pacific countries hold economic cooperation and political relations as well as an implementation of the cooperation relations negaa Indonesia and South Pacific nations. Indonesia and the South Pacific region that geographically contiguous and have a common natural resource in the field of fisheries and tan makes these two actors work together with the needs of each country. Cooperation is engaged in economic and political fields.

In the writing of these thesis, authors use descriptive-analytic methods were then supported by quantitative data. This method is described in a systematic way on the data or variables related to the background of Indonesian cooperation relations with the countries of the South Pacific and Indonesia embodiment cooperative relationship with the countries of the South Pacific. The collection of data used by the authors is a literature review (library research) by collecting literature relating to the subject matter to be discussed in the form of books, documents, journals, articles, or newspaper and conducted interviews. The data analysis technique used is the analysis is qualitative descriptive analysis, namely data obtained from the literature is then connected between the data that there is then the problem is described and analyzed based on the data available and compiled in writing and drawn a the final conclusions from the data available.

The results of this study indicate that the background of relations of cooperation between Indonesia and the South Pacific countries based on the needs and interests of each country respectively. Indonesia much to give aid in the form of technical cooperation such as capacity building in the fields of economy and good governance in the political field to the countries South Pacific (Fiji, Vanuatu, Papua New Guinea), for countries in the South Pacific will be minimal development progress his country is caused by the capacity lack of human resources, demographics who are few, as well as access to hard to reach. The main purpose other than helping the country's development in order to maintain the stability of the region, Indonesia get the benefits is to reverse the advocates of the three countries in a bid to West Papuan independence from Indonesia. Melanesian ethnic ties that make countries in the South Pacific where the name of solidarity fully supports separatism in West Papua. This issue has also become an international issue that is worrying Indonesia to the threat of sovereign integrity of NKRI (Republic of Indonesia).

Keywords: Cooperation, Indonesia, South Pacific, Melanesia, West Papua issue

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasifik Selatan merupakan sebuah kawasan yang terletak di sebelah timur wilayah Indonesia yang tepatnya berbatasan antara Papua Barat dengan Papua Nugini sampai ke kepulauan *Pitcairn*, serta Australia dan Selandia Baru dibagian selatan. Pasifik Selatan merupakan kawasan yang memiliki karakteristik berupa hamparan lautan yang luas, terdiri dari negara pulau dan kepulauan yang sering dijuluki sebagai *pacific rim* (baskom pasifik) yang dimana secara geografis merupakan kawasan pasifik selatan meliputi luas 30 juta km² di sebelah selatan samudera Pasifik.

Pasifik Selatan pada awalnya dihuni oleh imigran-imigran dari Asia Tenggara dan Asia lainnya kemudian dikenal sebagai suku bangsa Melanesia, Mikronesia dan Polinesia. Melanesia, dari gugusan pulau di sebelah utara dan timur laut Australia, yaitu Papua Nugini, Solomon Islands, Vanuatu, Fiji, dan New Caledonia. Ciri fisiknya yaitu berkulit gelap dan berambut keriting. Mikronesia terdiri dari delapan negara, yakni Micronesia, Guam, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Northern Mariana islands, Palau, dan Wake Islands. Ciri fisiknya adalah berkulit hitam, dan memiliki hidung kecil Polynesia terdiri dari gugusan pulau ditengah dan selatan samudera hindia seperti

Hawaii, New Zealand, Easter Island. Ciri fisiknya yakni bertubuh tinggi kekar, tegap, kulit agak cerah dan rambut lurus.

Perekonomian negara-negara di Pasifik Selatan pada umumnya masih terbatas. Penghasilan utama yang diandalkan adalah dari sektor-sektor perikanan, perkebunan kelapa, pariwisata, dan kerajinan tangan. Sektor pariwisata di kawasan ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar. Pada tahun 2005, Pasifik Selatan ini memperoleh devisa mencapai USD 1,5 Milyar (*Pacific Island Trade and Invest*, 2012)¹.

Di sektor pertanian negara-negara di Pasifik Selatan, secara umum memiliki potensi yang bagus untuk pengembangan jenis komoditi premium seperti kopra, kopi, kakao, kelapa sawit dan tebu². Namun demikian, negara-negara dalam kawasan ini belum dapat memaksimalkan nilai ekonomis dari potensi sumber daya alam yang dimiliki. Kendala yang dimiliki seperti masih terdapat pada minimnya jumlah penduduk, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, dan minimnya investasi serta bantuan dari negara lain menjadi banyaknya kendala berkembangnya pembangunan negara.

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara di Pasifik Selatan yang menjadi potensi dalam aktivitas perekonomian. Namun, pemanfaatan sumber daya alam terlihat tidak maksimal. Di satu sisi, sistem ekonomi negara-negara ini telah membuka pasar mereka secara bebas dan juga mereka terbuka untuk menerima bantuan asing serta investasi negara lain.

¹ Hery Saripudin, dkk., Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik & Afrika Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Kementerian Luar Negeri Indonesia (2013). *Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan: Menimbang Etnis Melanesia Dalam Diplomasi Indonesia*. Jakarta: P3K2 Aspasaf.

² Ibid. Hal 5.

Negara-negara yang selama ini memegang peranan penting terhadap Pasifik Selatan adalah Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Jepang, Australia, New Zealand, Cina dan Rusia. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga menjadi negara yang memberikan bantuan secara teknis, dimana bantuan itu dibingkai dalam hubungan kerjasama di beberapa bidang.

Negara-negara Pasifik Selatan pada umumnya menganut sistem pemerintahan demokrasi liberal. Pandangan politik negara-negara ini masih cenderung berorientasi kepada negara-negara bekas penjajahnya karena ketergantungan mereka terutama dalam bidang perekonomian dan pertahanan. Namun, ada beberapa negara seperti Papua Nugini, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Kiribati, Fiji, dan Samoa Barat yang telah mulai mengambil sikap yang independen³.

Keterbatasan kemampuan yang telah dijelaskan diatas membuat negara-negara di Pasifik Selatan ini memanfaatkan peluang dari kondisi globalisasi saat ini. Negara-negara di Pasifik Selatan mulai membuka hubungan dengan negara-negara lain selain dari negara bekas penjajahnya (Amerika, Inggris, Perancis dimana negara kawasan tersebut mulai menjalin hubungan kerjasama di berbagai bidang, juga membuka akses investasi asing, serta membuka pasar secara bebas. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa negara di Pasifik Selatan.

³ Syamsuddin Haris, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (1989). *Jurnal Politik*. Jakarta: PT Gramedia.

Indonesia adalah negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis Indonesia terletak di antara dua samudera (Samudera Hindia dan Pasifik) serta antara dua benua (Benua Asia dan Australia). Letak Indonesia sangat strategis sehingga berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan dimensi lainnya. Dengan jumlah populasi sekitar 250 juta penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat nomor empat di dunia.

Komposisi etnis di Indonesia sangat bervariasi karena negeri ini memiliki ratusan ragam suku dan budaya. Meskipun demikian, lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh dua suku terbesar. Dua suku terbesar ini adalah Jawa (41 persen dari total populasi) dan suku Sunda (15 persen dari total populasi)⁴. Indonesia juga memiliki etnis Melanesia. Etnis ini berada di Indonesia Timur yang dimana terdapat 13 juta jiwa yang tersebar di lima provinsi yakni provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT)⁵.

Dilihat dari sisi ekonominya, Indonesia adalah negara yang memiliki potensi perekonomian yang tinggi; potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekonomi paling besar di Asia Tenggara. Sumber daya alam yang melimpah dengan keanekaragaman didalamnya menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara

⁴ Indonesia Investments.(2016). *Penduduk Indonesia*. Di akses dari <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/demografi/item67>. Tanggal 12 Februari 2016.

⁵ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia . (2013).*Kerjasama Selatan-Selatan*. Di akses dari <http://portal.kemlu.go.id/Pages/NewsKemlu.aspx?IDP=385&l=id>. 12 februari 2016

yang potensial. Indonesia merupakan negara yang sangat aktif menjalin hubungan dengan negara-negara maupun organisasi non negara. Hal ini dilakukan sebagai langkah memajukan pembangunan negara serta meningkatkan kebutuhan nasional negara yang tidak bisa diakomodasi oleh negara Indonesia sendiri.

Hubungan Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan telah lama terjalin dan terus mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Indonesia pertama kali membuka hubungan diplomat di kawasan ini dengan Fiji, yaitu pada tahun 1974, dan terakhir dengan Kiribati pada tahun 2013⁶. Dewasa kini, peningkatan *engagement* Indonesia di Pasifik Selatan terus dilakukan. Negara-negara di Pasifik Selatan berada dalam tiga subkawasan, yaitu Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia.

Arti penting Pasifik Selatan bagi Indonesia dapat dilihat dari aspek kawasan sebuah yang merupakan salah satu prioritas dalam pertimbangan politik luar negeri Indonesia selain kawasan Asia Tenggara. Stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut penting artinya bagi Indonesia yang sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang. Suatu Pasifik Selatan yang stabil dan damai serta ikut menopang usaha pembangunan nasional Indonesia dan ikut mendukung upaya untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai wilayah damai, bebas, netral, sejahtera, dan bebas dari senjata nuklir. Keadaan yang

⁶ Hery Saripudin, dkk., Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik & Afrika Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Kementerian Luar Negeri Indonesia. *Op.cit.* Hal 16

tidak stabil di kawasan pasifik dapat memberikan dampak yang bersifat negatif terhadap stabilitas dan ketahanan nasional Indonesia⁷.

Kedekatan geografis Indonesia dengan Pasifik Selatan telah mendekatkan posisi Indonesia dengan negara-negara di kawasan tersebut, terutama dalam memperjuangkan masalah tertentu di forum internasional. Tidak kalah pentingnya, masyarakat di kawasan Pasifik Selatan memiliki kesamaan akar budaya, khususnya dengan masyarakat Indonesia yang bermukim di kawasan timur Nusantara⁸.

Berdasarkan pendekatan geostrategi *concentric circle*⁹ yang menetapkan urutan prioritas kawasan dalam melaksanakan politik luar negeri, kawasan pasifik selatan yang secara geografis berbatasan langsung dengan Indonesia, sudah semestinya menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Pasifik Selatan dipandang sebagai *sphere of primary strategic interest*¹⁰ baik secara politik, sosial budaya, maupun ekonomi. Hal ini justru mempunyai posisi strategis bagi upaya menjaga kedaulatan dan mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedekatan tersebut menjadi modal utama counter gerakan separatism papua dan kampanye simpatisan mereka di beberapa negara kawasan Pasifik Selatan.

⁷ Syamsuddin Haris, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Op.cit.* Hal 34

⁸ Kementerian Luar Negeri. (2016). *Meningkatkan Diplomasi Ekonomi Di Kawasan Pasifik*. Di akses dari <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/209-diplomasi-februari-2015/1834zpeningkatan-hubungan-dengan-negara-negara-kepulauan-pasifik.html>. Tanggal 2 januari 2016.

⁹ Lingkaran konsentris yang merupakan istilah unit analisa kebijakan luar negeri Indonesia untuk wilayah yang dekat.

¹⁰ Lingkaran konsentris politik luar negeri secara geografis, geostrategis, dan geopolitik.

Beberapa negara yang memiliki etnis Melanesia seperti Fiji, Solomon Islands, Vanuatu, Papua Nugini mendukung untuk kemerdekaan Papua Barat¹¹. Kekuatan rasa persaudaraan Melanesia menjadi dukungan kuat. Hal ini tentu saja mengancam kedaulatan keutuhan negara Indonesia. Dengan dasar itu, Indonesia terus menjalin dan menjaga hubungan demi menciptakan rasa percaya masyarakat terutama sesama etnis melanesia di Pasifik Selatan, mengenai stigma bahwa Indonesia adalah negara penjajah. Salah satu upaya untuk membangun rasa percaya dan dukungan terhadap kedaulatan Indonesia, adalah dengan menjalin kerjasama dalam beberapa bidang. Di antaranya adalah bidang ekonomi dan politik.

Dalam sektor ekonomi, negara-negara di Pasifik Selatan memiliki potensi yang cukup besar bagi pengembangan hubungan kerja sama di bidang perdagangan. Sektor yang dimiliki kedua aktor ini, seperti di bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, serta sumber daya alam lainnya. Pasifik Selatan cukup potensial bagi pengembangan hubungan perdagangan yang lebih luas.

Melihat bahwa negara-negara di wilayah tersebut sangat tergantung pada impor komoditi-komoditi tertentu untuk memenuhi kebutuhannya, keadaan ini menjadi peluang bagi negara-negara Pasifik Selatan untuk mempererat hubungan kerjasama demi pembangunan negara-negara Pasifik Selatan yang lebih maju. Demikian pula potensi ini menjadi peluang bagi negara-negara besar untuk menanamkan pengaruh dengan bentuk kerjasama

¹¹ Hery Saripudin,dkk., Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik & Afrika Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Kementerian Luar Negeri Indonesia. *Op.cit.* Hal viii

ekonomi yang cenderung Negara-negara di Pasifik Selatan akan tergantung kepada mereka¹².

Negara-negara seperti Vanuatu, Fiji, Papua Nugini, Solomon Islands, dan New Caledonia merupakan negara yang lebih berkembang dibandingkan negara-negara lainnya di kawasan Pasifik Selatan. Dari sisi kepentingan politik, kelima negara ini merupakan negara yang berada dalam organisasi *Melanesian Spearhead Group* (MSG), dimana isu solidaritas Papua menjadi salah satu agenda utamanya.

Dari kesamaan kedekatan geografis dan sosial budaya, kelima negara kunci memiliki kesamaan sub-etnis Melanesia dan dalam hubungan ekonomi, selain Papua Nugini sebagai negara terbesar di Pasifik Selatan, empat negara kunci lainnya juga memiliki hubungan ekonomi yang relatif lebih banyak serta hubungan dengan negara lain juga lebih aktif yang menghasilkan kelima negara ini cukup berkembang pembangunan negaranya.

Negara Vanuatu menjadi salah satu negara yang sangat aktif menyuarakan isu dukungan terhadap separatisme Papua Barat di Indonesia. Baik di dalam dialog politik internal negara Vanuatu dan juga di organisasi *Melanesian Spearhead Group* (MSG)¹³. Fiji dan Papua Nugini juga mendukung penuh gerakan pembebasan Papua Barat (OPM) masuk dalam organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG). ketiga negara ini juga

¹² Syamsuddin Haris. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Op. cit.*

¹³ Benny Wenda. CNN INDONESIA. (2016). Negara-negara Melanesia Dukung Pembebasan Papua. Di akses dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160218124454-20-111775/benny-wenda-negara-negara-melanesia-dukung-pembebasan-papua/>. Tanggal 27 Juni 2016

termasuk negara-negara yang akses transportasi yang cukup mudah dijangkau diantara negara-negara Pasifik Selatan lainnya.

Indonesia dan negara-negara di Pasifik Selatan menyepakati bahwa mereka saling membutuhkan dan bisa mendapatkan keuntungan dalam proses pembangunan dan kebutuhan negara masing-masing. Indonesia dengan isu keutuhan wilayahnya sebagai kesatuan republik (isu separatism Papua Barat), serta tujuannya dalma membantu Negara-negara berkembang dalam proses pembangunan ekonomi negaranya, dengan cara memberikan bantuan hubungan kerjasama dan untuk negara-negara di Pasifik Selatan, membutuhkan indonesia demi sumbangsih secara konstruktif terhadap pembangunan ekonomi Negara-negaranya yang lebih baik, dan indonesia juga dapat dijadikan sebagai jalur penghubung hubungan kerjasama lebih luas di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis memilih judul penelitian *Hubungan Kerjasama Indonesia Dengan Negara-negara Pasifik Selatan*.

B. Batasan dan Merumuskan Latar Belakang Masalah

Berdasarkan penjelasan dan fakta mengenai arti penting hubungan kerjasama antara negara Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan, serta kemajuan atas pembangunan negara menjadi acuan masing-masing negara untuk terus menjalin dan meningkatkan kerjasama. Di satu sisi kepentingan nasional menjadi fondasi pemikiran menjalin hubungan kerjasama. Kedekatan

secara sosial dan budaya serta kedekatan geografis menjadi faktor penting bergeraknya kerjasama di berbagai bidang.

Mengingat jumlah negara yang berada di kawasan Pasifik Selatan sebanyak 16 negara, dan luasnya cakupan hubungan kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan, maka untuk mempermudah pembahasan penelitian, penulis hanya membatasi pada tiga negara, yaitu: Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini. Melihat ketiga negara ini sebagai *representative* dalam Pasifik Selatan, dari hubungan diplomatiknya, kesamaan budaya, kedekatan wilayah secara geografis dan akses transportasi dengan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Pasifik Selatan lainnya, serta 90% dari jumlah penduduk dan 95% dari GDP (*Gross Domestic Product*) berada diketiga negara tersebut¹⁴.

Untuk sektor kerjasama yang dilakukan, penulis juga membatasi pembahasan mengenai kerjasama yang ada, yaitu hanya kerjasama di bidang ekonomi dan politik. Sebab kerjasama ekonomi dan politik menjadi kerjasama utama Indonesia dan ketiga negara tersebut. Kerjasama ekonomi yang dimaksudkan adalah kerjasama teknis yakni bantuan teknis materil non materil terhadap pembentukan serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam selaras dengan nilai ekonomis dan kerjasama di bidang politik dalam pembangunan system pemerintahan yang baik sebagai sesama negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan keamanan internal negara.

¹⁴ Hery Saripudin,dkk., Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik & Afrika Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Kementerian Luar Negeri Indonesia. *Op.cit.* Hal 3

Secara demikian, penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi hubungan kerjasama Indonesia dengan Negara-negara Pasifik Selatan?
2. Bagaimana Wujud hubungan kerjasama Indonesia dengan Negara-negara Pasifik Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian tentang hubungan kerjasama Indonesia dengan Negara-negara Pasifik Selatan, yaitu :

- a. Untuk mengetahui latar belakang hubungan kerjasama Indonesia dengan Negara-negara Pasifik Selatan.
- b. Untuk mengetahui wujud dari hubungan kerjasama Indonesia dengan Negara-negara Pasifik Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian tentang hubungan kerjasama Indonesia dengan Negara-negara Pasifik Selatan, yaitu :

- a. Diharapkan dapat menjadi tambahan referensi informasi dan pengetahuan mengenai latar belakang serta wujud dari hubungan kerjasama Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan, konsep kerjasama dan Kawasan bagi pembaca khususnya bagi akademisi Ilmu Hubungan Internasional.

- b. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Strata Satu (S1) pada Departemen Hubungan Internasional di Universitas Hasanuddin.

D. Kerangka Konseptual

1. Hubungan Kerjasama

Pada dasarnya kerjasama merupakan usaha terkoordinasi di antara anggota atau aktor yang diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. kerjasama adalah suatu bentuk interaksi yang beragam dimana tujuan aktor yang satu berkaitan erat dengan tujuan aktor. Sebelum adanya kerjasama harus ada yang dibentuk yaitu interaksi/ hubungan atas dasar kepercayaan, kesamaan identitas maupun kebutuhan yang satu sama lainnya bisa melengkapi. Setelah adanya hubungan atau ikatan yang terjalin barulah bisa tercipta kerjasama. Bentuk kerjasama biasanya menghindari dari adanya konflik atau kekerasan antar sesama aktor.

Kerjasama antar Negara-negara pada saat ini merupakan fenomena yang tidak bisa dihindarkan. Kerjasama dilakukan demi memenuhi kapasitas dan kebutuhannya. Pemilihan negara yang diajak kerjasama pun dapat dilihat dari beberapa aspek. Jarak/ kedekatan secara geografis, kesamaan budaya menjadi salah satu faktornya. Adanya kesamaan ini memudahkan adanya kerjasama serta adanya interdependensi¹⁵.

Untuk menganalisis hubungan Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan ini, maka salah satu konsep yang digunakan yakni konsep hubungan

¹⁵ Nuraeni Suparman. (2010). *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

bilateral. Kerjasama dapat diadakan dalam berbagai bentuk mulai dari kerangka kerjasama multilateral maupun kerjasama bilateral. Hubungan bilateral sebagai suatu konsep dalam hubungan internasional memiliki makna yang lebih kompleks dan lebih beragam serta mengandung sejumlah pengertian yang berkaitan dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri.

Konsep hubungan bilateral ini digunakan untuk memperkokoh kerjasama antara dua Negara dengan menggunakan pengaruhnya sehingga dapat mencapai tujuan nasionalnya. Didi Krisna dalam kamus politik internasionalnya mengatakan bahwa Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua Negara¹⁶

Pernyataan ini mengandung arti bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua negara. Dalam hal ini hubungan tersebut terjadi antara Indonesia dan sebuah negara di Pasifik Selatan. Hubungan bilateral dalam hubungan internasional selalu berada dalam dua konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan internasional ini berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Pola interaksi hubungan bilateral dalam konteks kerjasama diidentifikasi dengan bentuk kerjasama bilateral.

Dalam kerangka pemahaman Holsti dijelaskan bahwa terbentuknya suatu kerjasama berdasar pada kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling

¹⁶ Didi Krisna. (1993). *Kamus Politik Internasional*. Jakarta :Grasindo.

mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses inilah yang di sebut dengan kerjasama¹⁷

Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut. Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah Negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional¹⁸.

Dalam hal ini, hubungan kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia dan negara –negara Pasifik Selatan didasari oleh kebutuhan negara masing-masing. Negara pasifik membutuhkan bantuan dan pengembangan potensinya dari negara Indonesia, dan negara Indonesia butuh merealisasikan dan mengembangkan kepentingan negaranya dengan merealisasikan hubungan kerjasama dengan Negara-negara Pasifik Selatan dilihat dari lingkaran konsentris prioritas hubungan internasional Indonesia yang mementingkan

¹⁷ K. J. Holsti. (1998). *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis* , Erlangga: Jakarta.

¹⁸A,Jakaria. (2012). Analisis Kerjasama Internasional Indonesia dan Fiji.*Teori Kerjasama Internasional bab II*. Di akses unikom.ac. http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/544/jbptunikompp-gdl-helderoliv-27161-6-unikom_h-i.pdf. Skripsi Universitas Komputer Indonesia. Fakultas Ekonomi..Tanggal 9 februari 2016.

kawasan Pasifik Selatan. Kedua aktor ini saling memanfaatkan atas potensi yang dimiliki masing-masing. Dengan dasar kesamaan budaya dan kedekatan geografis rasa percaya dan saling membuka diri (hubungan kerjasama) mudah terjalin antar kedua aktor ini.

2. Arti Kawasan Pasifik Selatan

Pada awalnya, studi kawasan biasanya didefinisikan dengan menyadari atau menekankan kepada basis geografis dari Negara-negara yang dikaji. Sehingga disimpulkan sebagai kumpulan Negara-negara yang berdekatan secara geografis yang biasanya memiliki kesamaan budaya, bahasa, serta potensi sumber daya alam.

Terbentuknya sebuah integrasi regional yang menciptakan sebuah regionalisme, yang merupakan bersatunya dua atau lebih Negara yang berada dalam satu wilayah geografis, pada dasarnya berangkat pada asumsi bahwa pemusatan perhatian pada Negara-negara dan secara individu sebagai unit utama sudah tidak lagi memadai, bahkan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan pada Negara-negara itu sendiri. Perspektif integrasi regional menunjukkan bukti bahwa Negara-negara di dunia secara ekonomi maupun kultural semakin saling bergantung satu sama dengan yang lain setelah berakhirnya Perang Dunia II¹⁹.

Wilayah Samudra Pasifik yang meliputi 1/3 dari permukaan bumi,. Terdapat banyak bagian wilayah dan kumpulan negara dari pendekatan geografis, dikenal dengan Kawasan Asia Pasifik, dimana meliputi semua

¹⁹ Ibid.

negara yang menyentuh benua Asia, Australia, dan Benua Amerika termasuk negara-negara pulau kecil di tengah samudera Pasifik. Asia Pasifik merupakan suatu wilayah yang mencakup negara-negara Asia yang menyentuh Samudera Pasifik, yaitu: Asia Tenggara (Indonesia, Thailand, Malaysia), Asia Timur (Jepang, Tiongkok,) dan Pasifik Barat Daya atau yang sekarang dikenal dengan istilah Pasifik Selatan.

Awalnya istilah Pasifik Barat Daya diberikan oleh tentara sekutu negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lain yang terlibat menjadi aktor dalam Perang Dunia II dimana dijadikan sebagai tempat uji coba nuklir. Keadaan geografis Pasifik Barat Daya yang terdiri atas beribu-ribu pulau kecil, jurang-jurang kedalaman lautan serta jumlah penduduk yang sangat sedikit, menyebabkan wilayah ini jadi tempat percobaan nuklir.

Istilah Pasifik Barat Daya terdapat pula pada GBHN (Garis Besar Haluan Negara) di tahun 1983 dan 1988 yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dalam menetapkan kawasan Pasifik sebagai kawasan yang diprioritaskan dalam membantu menjaga kestabilan Indonesia. Istilah ini mengacu pada semua negara yang berada dalam kawasan segitiga Pasifik yaitu pertemuan khatulistiwa ke barat menyentuh pesisir timur Asia Tenggara dan ke selatan menyentuh bagian Antartika²⁰. Di Indonesia istilah Pasifik Barat Daya digunakan hingga masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada forum SwPD (Southwest Pacific Dialogue) merupakan forum yang digagas oleh Indonesia dan dibentuk pada tahun 2002 di Yogyakarta. SwPD

²⁰ Drs.H.Zulkifli Hamid. (1996). *Sistem Politik Pasifik Selatan*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.

beranggotakan Australia, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Selandia Baru dan Timor Leste²¹.

Negara-negara yang mencakup Pasifik Barat Daya yaitu: Indonesia, Australia, Papua Nugini, New Zealand, Vanuatu, New Caledonia, Solomon Island, dan Fiji. Sedangkan kawasan Pasifik Selatan hamper masuk negara-negara yang mencakup kawasan Pasifik Barat Daya namun negara Indonesia tidak masuk dalam cakupannya.

Perbedaan Pasifik Barat Daya dan rujukan istilah Pasifik Selatan bukan hanya terletak pada perbedaan geografis dan cakupan negaranya. Namun juga terletak pada penggunaannya dalam konteks interaksi dengan negara, dan juga sebagai forum atau regional yang diakui oleh dunia internasional. Istilah Pasifik Selatan digunakan dalam forum South Pacific Forum (SPF) di tahun 1971 dan dipahami sebagai kawasan yang terdiri dari 16 negara anggota yakni Australia, Cook islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, New Zealand, Niue, Tokelau, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Timor Leste, dan teritori AS (American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands)²². Penggunaan istilah Pasifik Selatan hingga dewasa ini lebih banyak dioperasionalkan oleh aktivitas-aktivitas hubungan internasional.

²¹KIK Aspasaf. (2012). *Kemenerian Luar Negeri Indonesia. Indonesia Pelopori Pengembangan Konektivitas Sub-Kawasan Pasifik Barat Daya*. Di akses <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-Pelopori-Pengembangan-Konektivitas-Sub-Kawasan-Pasifik-Barat-Daya.aspx>. Tanggal 1 Agustus 2016.

²²Mohammad Hery Saripudin, dkk., Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik & Afrika Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Kementerian Luar Negeri Indonesia. *Op.Cit.* Hal 37

Oleh sebab itu, penulis menggunakan penggunaan kawasan Pasifik Selatan sebab rumusan masalah yang dianalisis adalah hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan, karena jika menggunakan istilah Pasifik Barat Daya, Indonesia juga termasuk salah satu negara yang tercakup. dalam hal ini tiga negara yang masuk dalam etnis Melanesia (Fiji, Papua Nugini, Vanuatu) sebab ketiga negara ini cukup banyak relasinya dengan Indonesia.

Beberapa negara yang masuk dalam kawasan ini, terdapat beberapa Negara yang aktif dalam kerjasama global serta terlihat berkembang secara intens perekonomian serta politiknya. Diantaranya Negara Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini. Fiji merupakan Negara yang memiliki potensi menjadi Negara penghubung ke Negara-negara pasifik selatan lainnya. Potensi sumber daya lama seperti bidang pariwisata, perikanan dan kelautan menjadikan Fiji Negara yang banyak mengadakan kerjasama dengan Negara-negara besar seperti jepang dan amerika. Sama hal dengan negara Papua Nugini dan Vanuatu yang tingkatan perekonomian dan integritas politiknya cukup bagus dan menjanjikan keuntungan dari kerjasama yang dilakukan.

Kawasan Pasifik Selatan kaya akan sumber daya alam namun kurang optimal pemanfaatannya baik dari segi non materil menjadi materil, belum lagi isu global warming yang mengancam tenggelamnya wilayah di pasifik selatan. Kawasan Pasifik Selatan juga merupakan jalur perhubungan laut yang penting dan sangat ramai antar negara-negara yang terdapat di kawasan samudera pasifik. Pasifik selatan kaya akan sumber daya alam, terutama di bidang perikanan. Sejak diterimanya konsepsi Zona Ekonomi Eksklusif,

negara-negara besar yang berkepentingan menangkap ikan di perairan tersebut berusaha menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara Pasifik Selatan²³.

Kawasan Pasifik Selatan sampai saat ini masih besar potensi yang dimiliki namun tertahan oleh kurangnya pengembangan dan pengelolaan dari dalam negara sendiri, maka dari itu sampai saat ini pula beberapa negara masih bergantung dari negara bekas penjajahnya seperti amerika dan perancis. Sebagian negara Pasifik Selatan juga sangat bergantung dengan bantuan dari beberapa negara besar lainnya.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam hubungan kerjasama Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan, yaitu dengan menggunakan tipe Deskriptif-Analitik. Deskriptif-analitik merupakan tipe yang menggambarkan fenomena dengan bantuan data lalu ditarik kesimpulan. Tipe ini menggambarkan (deskriptif) urutan bentuk kerjasama di bagian awal, lalu berdasarkan data yang diperoleh penulis menganalisa (analitik) dari wujud kerjasama yang dilakukan sehingga metode ini mampu menggambarkan hubungan kerjasama Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan menelaah sejumlah literatur, yang terdiri dari buku, jurnal, dokumen, surat

²³ Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Op. cit.* Hal 35.

kabar harian, serta media elektronik. Dari hasil penelusuran bahan-bahan bacaan tersebut, penulis lalu memilah dan menyesuaikan dengan materi skripsi yang akan diteliti.

Adapun tempat penelitian yang penulis kunjungi untuk memperoleh data, yaitu :

- a. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Indonesia ,di Jakarta.
- b. Direktorat Kawasan Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Indonesia, di Jakarta.
- c. Direktorat Kerjasama Teknik Kementerian Luar Negeri Indonesia, di Jakarta.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan penulis dalam menganalisis data penelitian adalah kualitatif. Untuk menganalisa permasalahan, penulis akan menggambarannya berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Penulis juga akan menambahkan data kuantitatif untuk memperkuat analisis kualitatif.

4. Metode Penulisan

Metode yang penulis gunakan adalah metode deduktif, yaitu dengan menggambarkan masalah secara umum lalu ditarik kesimpulan secara khusus.

BAB III

IDENTIFIKASI HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA PASIFIK SELATAN

A. Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau. Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5,2 juta km² , terdiri dari 1,9 juta km² daratan dan 3,3 juta km² lautan. Lima pulau besar di Indonesia adalah Sumatera dengan luas 480.793,28 km² , Jawa 129.438,28 km², Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) 544.150,07 km² , Sulawesi 188.522,36 km² , dan Papua 416.060,32 km²¹.

Letak geografis Indonesia berada di antara 6° Lintang Utara - 11° Lintang Selatan dan 95° Bujur Timur - 141° Bujur Timur. Jika dibentangkan, maka wilayah Indonesia berada di sepanjang 3.977 mil antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera memberi pengaruh besar terhadap kebudayaan, sosial, dan ekonomi masyarakatnya.

Berdasarkan dari data Susenas 2014 dan 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis kalau jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 254,9 juta jiwa. Dari data tersebut, rinciannya adalah penduduk laki-laki berjumlah 128,1 juta jiwa dan perempuan berjumlah 126,8 juta jiwa. Dengan jumlah total

¹Azis Hoesein,dkk. (2013). Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum 2013. Kementerian Pekerjaan Umum..*Gambaran Umum Indonesia*. Di akses <http://www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20141113100214.pdf>. Hal 15-186. tanggal 14 Mei 2106Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum 2013. Kementerian Pekerjaan Umum. (2013). *Gambaran Umum Indonesia*. <http://www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20141113100214.pdf>. Hal 15-186.

populasi diatas dapat dilihat bahwa Indonesia adalah salah satu negara berpenduduk terpadat di dunia. Komposisi etnis di Indonesia amat bervariasi karena negara ini memiliki ratusan ragam suku dan budaya. Meskipun demikian, lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh dua suku terbesar.

Dua etnis terbesar ini adalah Jawa (41 persen dari total populasi) dan suku Sunda (15 persen dari total populasi)². Terdapat juga etnis melanesia yang berada di bagian Indonesia timur. Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Luar Negeri, Indonesia memiliki populasi etnis melanesia terbesar dengan jumlah mencapai 11 juta orang. Mereka tersebar di lima provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur³.

Melanesia adalah sebuah Etnis yang berada di wilayah dari Pasifik bagian Barat sampai ke laut Arafuru, utara dan timur laut Australia. Istilah ini pertama kali digunakan oleh penjajah Prancis Jules Dumont d'urville 1832 untuk menunjuk ke sebuah kelompok etnis dan pengelompokan pulau-pulau yang berbeda dari polnesia dan mikronesia.

Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kaya Indonesia akan sumber daya alam dengan segala flora, fauna dan potensi hidrografis dan deposit sumber alamnya yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia berasal

²Reza Priyambada,dkk. Indonesia Investments. (2016). *Penduduk Indonesia*. Di akses di <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/demografi/item67>. Tanggal 30 April 2016.Tanggal 30 April 2016.

³Ranny Utama.CNN Indonesia. (2015). *Kemlu RI: Keanggotaan MSG Dorong PembangunanIndonesiaTimur*diaksesdari<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150702163906-106-63932/kemlu-ri-keanggotaan-msg-dorong-pembangunan-indonesia-timur/>. Tanggal 30 April 2016.

dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi.

Indonesia memiliki luas laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 2,7 juta km². Hal ini yang menyebabkan wilayah pesisir dan lautan Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan dan keanekaragaman hayati (biodiversity) laut terbesar di dunia. Keanekaragaman yang dimiliki berupa ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang (coral reefs) dan padang lamun (*seagrass beds*)⁴.

Fakta fisik bahwa dua per tiga wilayah Indonesia berupa laut, maka sumber daya alam di laut memiliki potensi yang sangat besar. Selain mengandung minyak, gas, mineral dan energi laut non-konvensional, serta harta karun yang sudah mulai digali meskipun masih terbatas, laut juga menghasilkan ikan yang potensi lestariannya diperkirakan sebesar 6, 4 juta ton per tahun.

Saat ini yang baru dimanfaatkan sekitar 70 %. Pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan dikelompokkan dalam lima industri kelautan, yaitu industri perikanan, industri mineral dan energi laut, industri maritim, termasuk industri galangan kapal, industri pelayaran (transportasi laut) dan industri pariwisata (wisata bahari dan kawasan konservasi). Saat ini yang menjadi andalan ekspor perikanan Indonesia adalah udang dan Tuna⁵.

⁴ Kementerian Budaya Pariwisata Indonesia. (2014). Gambaran Umum Indonesia. (www.budpar.go.id/userfiles/file/4547_1355-djuanda.pdf).

⁵ Indra Sakti. Sistem Informasi Pengetahuan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan. (2016). *Kekayaan dan Potensi Sumber Daya Kelautan Indonesia*. Di akses dari <http://sip.psdkp.kkp.go.id/article/kekayaan-dan-potensi-dari-sumber-daya-kelautan-indonesia-459.html>. Tanggal 30 April.

Perbandingan luas wilayah laut Indonesia yang lebih besar daripada luas wilayah darat, tentunya berdampak terhadap potensi sumber daya alam yang dihasilkan. Dengan luas wilayah laut yang begitu besar menyebabkan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam hasil kelautan yang cukup besar pula. Saat ini pembangunan ekonomi di Indonesia lebih memanfaatkan potensi sumber daya daratan dari pada potensi sumber daya perairan laut.

Tidak hanya berpotensi di sumber daya alam di lautan, Indonesia juga turut memanfaatkan potensi daratan yang diketahui negara Indonesia tanhanya sangat subur di bidang pertanian, perkebunan. pertanian menjadi mata pencaharian terpenting bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Luas lahan pertanian lebih kurang 82, 71 % dari seluruh luas lahan. Lahan tersebut sebagian besar digunakan untuk areal persawahan.

Produksi pertanian lainnya adalah jagung, ubi jalar, kacang tanah dan kedelai. Produksi holtikultura jenis sayur mayur meliputi bawang merah besar, bawang daun, kentang, kubis dan wortel. Sedangkan produksi holtikultura jenis buah-buahan meliputi mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya dan salak.⁶

Hingga dewasa ini, pengelolaan sumber daya alam Indonesia masih terus memiliki peran lebih oleh sektor swasta (perusahaan asing).

Berdasarkan data-data di atas, maka dapatlah diketahui bahwasanya pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia lebih cenderung dilakukan oleh badan usaha swasta dibandingkan badan usaha milik negara. Sehingga tujuan pencapaian kemakmuran rakyat dari hasil pengelolaan sumberdaya alam

⁶Portal Nasional RI. (2013). *Sumber Daya Alam*. Di akses (<http://www.indonesia.go.id/en/potential/natural-resources>. tanggal 16 juli 2016

agaknyanya sulit tercapai, sebab pengelolaan sumber daya alam di Indonesia telah didominasi oleh badan usaha swasta/ asing. Namun, secara financial Indonesia masih mampu menjadi negara yang sering memberikan bantuan berupa materil dan non materil. Diantaranya bantuan dana Indonesia terhadap negara-negara di Kepulauan Pasifik Selatan sebesar US\$20 Juta⁷.

B. Pasifik Selatan

Pasifik Selatan merupakan sebuah kawasan yang terletak diantara tiga benua besar, yaitu Asia di bagian barat, Amerika di bagian timur, dan Australia di belahan selatan. Wilayahnya membentang sekitar 16.00 km dri Guam di bagian barat sampai ke Pitcairn di bagian timur dan membujur sekitar 15.000 km dari selat bering di Utara sampai ke *Antartic Circle* di bagian selatan⁸.

Pasifik Selatan merupakan kawasan yang dengan luas daratan hanya sekitar 552.000 km², dengan rasio 54 lautan berbanding 1 dengan daratan. Secara geografis merupakan kawasan pasifik selatan meliputi luas sekitar 30 juta kilometer persegi di sebelah selatan samudera Pasifik. Oleh karena itulah kawasan pasifik selatan dapat disebut sebagai “Benua Air” (*Aquatic Continent*)⁹.

Pasifik Selatan pada awalnya dihuni oleh imigran-imigran dari Asia Tenggara dan Asia lainnya kemudian dikenal sebagai suku bangsa Melanesia,

⁷ Robertus Wardi. Berita Satu. (2014). *SBY Akan Alokasikan Dana US\$20 Juta Untuk negara Kepulauan Pasifik*. Di akses dari <http://www.beritasatu.com/dunia/191175-sby-akan-alokasikan-us20-juta-untuk-negara-kepulauan-pasifik.html>. Tanggal 14 Juli 2016.

⁸ Drs. H. Zulkifli Hamid. (1996). *Sistem Politik Pasifik Selatan*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.

⁹ Ibid.

Mikronesia dan Polinesia. Melanesia, dari gugusan pulau di sebelah utara dan timur laut Australia, yaitu Papua Nugini, Solomon Islands, Vanuatu, Fiji, dan New Caledonia. Ciri fisiknya yaitu berkulit gelap. Mikronesia terdiri dari 8 negara, yakni Micronesia, Guam, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Northern Mariana islands, Palau, dan Wake Islands. Ciri fisiknya adalah berkulit hitam, dan memiliki rambut keriting¹⁰.

Polynesia terdiri dari gugusan pulau ditengah dan selatan samudera hindia seperti Hawaii, New Zealand, Easter Island. Ciri fisiknya yakni bertubuh tinggi kekar, tegap, kulit agak cerah dan rambut lurus. Melanesia, merupakan etnis yang secara demografi banyak berada di pasifik selatan. Negara- negara seperti Fiji, Papua Nugini, Vanuato, Solomon Islands, Timor Leste, Samoa, dan Kaledonia Baru merupakan negara-negara yang banyak dihuni oleh ras melanesia¹¹.

Kawasan Pasifik Selatan memiliki wilayah lautan yang meliputi 1/3 dari wilayah laut dunia. Terdiri dari pulau-pulau kecil yang umumnya terpisah satu sama lain dengan jarak yang berjauhan. Kondisi fisik Pasifik Selatan sangat didominasi oleh lautan. Keadaan pulau-pulaunya juga sangat rawan terhadap gejala-gejala ala, baik karena posisinya yang terbuka oleh arus angin dari berbagai arah, brasi air laut yang menerpa pantai-pantainya, maupun gempa bumi.

¹⁰ Moh Hery Saripuddin,dkk. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik & Afrika Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. (2013). *Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan: Menimbang Etnis Melanesia Dalam Diplomasi Indonesia*. Jakarta: P3K2 Aspasaf.

¹¹ Ibid. Hal 2

Dengan demikian, lingkungan di kawasan Pasifik Selatan menjadi sangat berbahaya apabila dijadikan untuk ujicoba senjata nuklir. Demikian pula bila lautannya dipergunakan sebagai tempat pembuangan sampah nuklir dan senjata konvensional, karena akan membahayakan bagi kelangsungan hidup sumber daya alam dan manusia.

Luas daratan masing-masing negara dan wilayah berbeda. Terdapat negara/ wilayah yang memiliki lahan yang sangat luas. Sumber daya alam yang melimpah seperti laut, dan mineral menjadi potensi yang besar bagi kawasan ini. Namun, perekonomian negara-negara Pasifik Selatan pada umumnya masih terbatas. Penghasilan utama yang diandalkan adalah dari sektor-sektor perikanan, perkebunan kelapa, dan pariwisata. Meskipun beberapa negara di antaranya memiliki potensi bahan-bahan tambang yang besar, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan¹².

Sama halnya dengan sumber daya alam lainnya seperti di bidang kelautan dan perikanan, pengelolaan akan sumber daya tersebut masih terbatas. Melihat bahwa minimnya kapasitas sumber daya manusia dan juga fakta bahwa komoditas-komoditas hampir semua merupakan barang impor dari negara lain. Bantuan-bantuan secara materil maupun non materil serta investasi menjadi penopang yang mendominasi berkembangnya pembangunan negara-negara di Pasifik Selatan.

¹²Syamsuddin Haris. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (1989). *Jurnal Politik*. Jakarta: PT Gramedia.

1. Fiji

Fiji adalah sebuah negara republik yang terletak di kawasan Pasifik Selatan, dalam gugus Kepulauan Melanesia. Luas wilayahnya adalah 18.274 km² dan dewasa ini Fiji merupakan salah satu negara dengan perekonomian paling maju dari negara-negara Pasifik Selatan. Jumlah penduduk sebanyak 903,207 jiwa di tahun 2014¹³. Penduduk Fiji terdiri dari suku pribumi Fiji (suku Polinesia), India, Cina, Eropa, dan suku-suku Melanesia serta Polinesia dari kelompok pulau-pulau sekitarnya, termasuk Tonga¹⁴.

Pada awalnya Fiji dihuni oleh Suku Melanesia dan Suku Polinesia, orang Eropa yang pertama kali datang ke Fiji adalah Abel Tasman pada tahun 1643. Kawasan Fiji resmi dipetakan pada tahun 1840 oleh Charles Wilkes dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Fiji kemudian di bawah kekuasaan Inggris sejak 1874. Sampai abad ke-19, kawasan Fiji sering dicekam perang antar suku. Sejak Inggris bercokol, perang demikian agak mereda. Penduduk asli Fiji terdiri dari bangsa Melanesia dan di bagian timur bangsa Polinesia¹⁵.

Fiji adalah negara jajahan Inggris sejak tahun 1874 hingga 1970. Tahun 1965 Fiji mendapatkan otonomi ke dalam dan pada tanggal 10 Mei 1970 Fiji merdeka dengan Perdana Menteri pertamanya yaitu Sir Kamisese Mara. Dalam perjalanan Fiji sebagai negara yang merdeka, banyak terjadi perubahan dan perkembangan, selain adanya perkembangan dan perubahan-

¹³CIA (CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY)GOV.LIBRARY. (2014). *THE WORLD FACT BOOK : PEOPLE AND SOCIETY*. Diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fj.html>. tanggal 27 Juni 2016

¹⁴ Et Al, Ensiklopedia Indonesia II CES-HAM. (1980). *Fiji*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. Hal 1003.

¹⁵ Ibid.

perubahan tersebut juga diwarnai adanya gejolak. Keadaan Fiji yang baru merdeka, menjadi keadaan Fiji belumlah stabil, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politiknya. Terbukti, pada tahun 1987 terjadi kudeta yang dilatar belakangi oleh masalah hubungan antar ras yaitu masalah pribumi dan keturunan India¹⁶.

Adapun pulau-pulau di Fiji adalah Viti Levu, Vanua Levu, Taveuni dan Koro. Negara ini beriklim tropis, terutama di wilayah sebelah timur pegunungan. Di wilayah ini banyak turun hujan, sehingga baik untuk pertanian. Ekonomi masyarakat di Fiji sebagian besar mengandalkan pertanian, dengan hasil utamanya adalah gula. Meskipun jasa, termasuk pariwisata, menyumbang sebagian dari pendapatan warga Fiji, kebanyakan warga Fiji bekerja di bidang pertanian.

Penduduk Fiji asli banyak yang bermata pencaharian di peternak sapi, babi, dan kambing serta menanam taman pangan untuk mereka gunakan sendiri di lahan-lahan kecil. Taro dan singkong serta ubi jalar adalah tanaman pangan utama di Fiji. Beras, pisang, kelapa, dan sukun juga dibudidayakan untuk makanan. (Sukun adalah buah tanpa biji. Ketika dipanggang, bentuknya akan menyerupai roti.) Industri di Fiji meliputi pengolahan ikan dan produk pertanian, seperti tebu dan kelapa, yang menghasilkan kopra (daging kelapa kering). Gula dan pakaian adalah ekspor utama Fiji. Ikan dan produk kelapa juga diekspor, bersama dengan emas dan kayu.¹⁷

¹⁶ Ibid hal 20.

¹⁷Fitriah Maharani.(2011). Kudeta Militer Fiji. *Latar Belakang Republik Fiji*. Di akses di <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t6319.pdf>. tanggal 15 Juli 2016. Tesis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial Politik

Fiji kaya akan sumber daya dan merupakan salah satu yang paling maju di antara negara-negara pulau Pasifik lainnya. Perekonomiannya bergantung pada ekspor gula, pariwisata, dan uang yang diterima dari orang Fiji yang bekerja di negara-negara lain. Perkembangan di Fiji tidak hanya di bidang politik saja, di bidang ekonomi saja, namun juga di bidang hubungan internasional. Fiji membangun hubungan diplomatik dengan beberapa negara besar seperti Amerika, Cina, dan Jepang. Di dalam kawasan Pasifik Selatan sendiri, Fiji merupakan negara yang berpengaruh terutama di *Pacific Island Forum*.

Kendala-kendala yang dimiliki dalam pembangunan negaranya yakni minimnya jumlah penduduk yang bermukim di Fiji, sarana pendidikan formal yang sedikit dan kurang berkapasitas baik dari segi ruang maupun sumber daya manusia. Fakta bahwa kendala-kendala yang ada mengakibatkan pemanfaatan dalam pengolahan maupun pengelolaan sumber daya alam yang bernilai ekonomis menjadi tidak optimal. Akibatnya, pemerintah Fiji hanya mengandalkan bantuan luar negeri serta produk-produk yang diimpor dari negara-negara besar seperti Amerika, Jepang, Australia dan Indonesia.

2. Papua Nugini

Papua Nugini adalah suatu negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat dengan Provinsi Papua (Indonesia) di sebelah barat, Benua Australia di sebelah selatan. Ibu kotanya, dan salah satu kota terbesarnya, adalah Port Moresby. Papua Nugini adalah salah satu negara

yang memiliki 850 bahasa lokal asli, dengan populasi 6,672,429 juta jiwa di tahun 2015¹⁸.

Orang-orang yang menghuni Papua Niugini berjumlah 98% dari rakyat pribumi, diantaranya Mikronesia, Polinesia serta pendatang dari negara Cina, Eropa, Australia dan beberapa negara lainnya¹⁹. Orang-orang pribumi di Papua Niugini terbagi-bagi menjadi kelompok. Hal itu berdasarkan dengan bahasa, adat istiadat dan tradisi, serta etnis yang dimiliki.

Papua Niugini (PNG) merdeka pada tanggal 16 September 1975 dan sejak awal sangat mengandalkan potensi sumber daya alam terutama tembaga, emas dan perak. Negara yang punya penduduk mencapai tujuh juta ini memiliki 20 Provinsi mulai dari Pulau Manus di Samudera Pasifik hingga Central Provinsi atau Daerah Pusat Ibukota Port Moresby. Belakangan Papua Niugini juga punya potensi kopi, hingga masyarakat di sana menyebut, kopi adalah *green gold* atau emas hijau.²⁰ Papua Niugini kaya akan sumber daya alam, tetapi eksploitasi dan pemanfaatannya sangat lambat disebabkan oleh medan/jalur yang berat (sulit diakses), masalah kepemilikan lahan, dan tingginya biaya pengembangan infrastruktur.

Hingga dewasa ini, perekonomian Papua Niugini semakin berkembang. Meskipun hasil perekonomian memiliki sektor formal kecil,

¹⁸CIA (Central Intelligence Agency). (2016). *The World FactBook Papua New Guinea : People And Society*. Di akses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pp.html>. tanggal 15 Juli 2016

¹⁹PhilipGibs.(2012). Globalization and the Re-Shaping of Christianity in the Pacific islands: Population. Di akses dari <http://www.philipgibbs.org/pdfs/PNG%20globalization.pdf>. Tanggal 15 Juli 2016. Hal 5.

²⁰ Dominggus AM. Artikel Tabloid Jubi. (2013). *Kekayaan Tambang Di Tanah Orang New Guinea*. Di akses dari <http://tabloidjubi.com/2013/01/07/kekayaan-tambang-di-tanah-orang-new-guinea/>. Tanggal 16 Juli 2016.

difokuskan terutama pada ekspor sumber daya alam, dan sektor informal, yang mempekerjakan mayoritas penduduk. Pertanian menyediakan mata pencaharian subsistem untuk 85% dari orang-orang. Krisis keuangan global berdampak kecil karena terus permintaan luar negeri untuk komoditas Papua Nugini²¹.

Pada tahun 2011 dan 2012, Parlemen Nasional mengesahkan peraturan yang menciptakan lepas pantai Sovereign Wealth Fund untuk mengelola surplus pemerintah dari mineral, minyak, dan proyek-proyek gas alam. Di dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah membuka pasar telekomunikasi dan transportasi udara, membuat kedua lebih terjangkau untuk masyarakat²².

Dalam sektor ekonomi, meskipun beberapa diversifikasi baru-baru ini, ekonomi Papua Nugini tetap didominasi oleh dua sektor: pertanian, kehutanan dan perikanan sektor, yang bergerak sebagian besar angkatan kerja (mayoritas informal); dan mineral dan ekstraksi energi sektor yang menyumbang mayoritas pendapatan ekspor dan Produk Domestik Bruto (PDB)²³.

Pada tahun 2015, tahun pertama produksi gas, ekonomi Papua Nugini diperkirakan hanya tumbuh 4,3% pada 2016. Non-mineral produk domestik bruto (PDB), yang lebih baik menunjukkan tren yang mendasari dan bagaimana pertumbuhan mempengaruhi kehidupan masyarakat, diproyeksikan akan tumbuh sebesar 3,4% pada 2016 dan 3,6% pada tahun 2017. Peningkatan

²¹ CIA (Central Intelligence Agency). (2016). *Op.cit*

²² Ibid.

²³ The World Bank. (2016). Overview: Papua New Guinea. Di akses dari <http://www.worldbank.org/en/country/png/overview>. Tanggal 15 Juli 2016

ketergantungan pada ekstraksi sumber daya menimbulkan peningkatan pendapatan ekonomi negara²⁴.

3. Vanuatu

Republik Vanuatu adalah satu negara kepulauan republik di Samudra Pasifik bagian selatan. Vanuatu berada di antara Australia di sebelah timur, dan Fiji disebelah barat, timur laut Kaledonia Baru, dan dan selatan Kepulauan Solomon. Negara ini awalnya bernama Hebrides Baru semasa penjajahan Perancis²⁵.

Populasi Vanuatu di tahun 2015 berjumlah sebanyak 272,264 jiwa. Vanuatu pertama kali dihuni oleh orang Melanesia sejak 1000 SM dengan di temukannya sisa-sisa budaya Lapita yang telah digali. Kebudayaan Lapita (1600 SM - 500 SM/1 M) merupakan catatan kepurbakalaan dari kolonisasi. Penduduk Vanuatu, atau *Ni-Vanuatu*, berada di sebagian besar (98,5%) dari Melanesia keturunan, dengan sisanya terdiri dari campuran Eropa, Asia dan kepulauan Pasifik lainnya²⁶.

Komponen terbesar dari Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sektor pertanian, industri dan pariwisata. Komoditas pertanian utama adalah kopra, daging sapi, dan kakao. Prioritas pembangunan pemerintah untuk tahun-tahun

²⁴ Asian Development Bank. (2017). Papua New Guinea Economy. Di akses dari <http://www.adb.org/countries/papua-new-guinea/economy>. Tanggal 16 Juli 2016

²⁵ Baltyra. (2009). Melanesia: Republik Vanuatu. Di akses dari <http://baltyra.com/2009/09/17/melanesia-republik-vanuatu/>. Tanggal 16 Juli 2016

²⁶ Hudaidah.(2004).*Op.cit*

mendatang diarahkan untuk pemanfaatan rasional sumber daya alam dan perluasan ekonomi tunai melalui kontribusi peningkatan sektor swasta²⁷.

Pendapatan hasil ekonomi yang menyumbang bagi pendapatan negara ada pada sektor pertanian dengan sekitar 80% dari penduduk terutama yang terlibat dalam pertanian subsistem tanaman pangan seperti talas dan ubi jalar. Pertanian dominan dalam ekspor akuntansi produktif sekitar 85% dari pendapatan ekspor nasional²⁸.

Sama halnya dengan negara-negara di Pasifik Selatan, Vanuatu sangat bergantung dengan negara-negara besar seperti Australia, Jepang, dan lain-lain. Ketergantungan pada bantuan asing sebanyak 60% dari pengeluaran pemerintah yang didanai oleh donor - investasi dalam pelayanan publik di Vanuatu telah terus bergeser dari penggunaan sumber daya alam untuk layanan seperti pendidikan dan kesehatan.²⁹ Atas dorongan dari donor, sebuah Program Reformasi Komprehensif diperkenalkan pada tahun 1996 untuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan, sebagai hasilnya, investasi Negeri di pertanian dan jasa yang berhubungan dengan pertanian dipotong oleh 80%³⁰.

C. Arti Penting Hubungan Kerjasama Indonesia dengan Negara-negara Pasifik Selatan.

Hubungan Indonesia-Fiji yang dimulai sejak pembukaan hubungan diplomatik pada tahun 1974 menunjukkan penguatan dari tahun ke tahun. Hal

²⁷ FAO (Food and Agriculture Organizations) Corporate Document Repository. *Vanuatu General Information*. Di akses <http://www.fao.org/docrep/003/x6900e/x6900e0y.htm>. tanggal 16 juli 2016

²⁸ Ibid.

²⁹ New Agriculturist. (2013). Vanuatu: Country Profile. Di akses <http://www.new-ag.info/en/country/profile.php?a=858#>. Tanggal 16 juli 2016

³⁰ Ibid.

ini ditandai dengan kunjungan Perdana Menteri Fiji Y.M Commodor Voreqe Bainimarama dan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Fiji Y.M. Ratu Inoke Kubuabola ke Indonesia pada tahun 2011 untuk membuka secara resmi Perwakilan Fiji di Jakarta³¹.

Dalam mekanisme penguatan hubungan bilateralnya, kedua negara telah menandatangani *Agreement Between The Republic For Development Cooperation* pada Mei 2011. Perjanjian ini merupakan payung kerjasama kedua negara dalam berbagai bidang yang mencakup kerjasama pertanian, perikanan, dan bidang lainnya. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Fiji menghasilkan yang disebut sebagai kerjasama prioritas.

Kerjasama prioritas ini merupakan kerjasama yang diutamakan untuk diimplementasikan bagi kedua negara sebab dilihat ini menjadi kebutuhan dasar bagi masing-masing aktor. Isi dari program kerjasama Prioritas, yakni: Engagement bagi dukungan terhadap NKRI, kerjasama teknis dalam bidang demokratisasi dan *Good Governance* dalam pemerintahan negara, serta *Capacity Building* Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Peningkatan *people to people contact* Melanesia salah satunya melalui melalui beasiswa pendidikan tinggi.

Berikut adalah poin-poin pertemuan dan kunjungan masing-masing kedua negara (Indonesia dan Fiji) :

1. Dokumen Strategis „Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on the Framework for

³¹Hery Saripuddin,dkk. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik & Afrika Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. (2013). *Op. cit.* Hal 33

Development Cooperation (Mei 2011) oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa yang kemudian menghasilkan Perjanjian Bilateral, 14 Dokumen (Agreement, Momenandum Of Understanding, Letter Of Intent) diantaranya di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, pendidikan, seni budaya, perdagangan dan investasi, kerjasama teknis, pariwisata, transportasi, hukum, kerjasama dalam mengembangkan kesepahaman di antara masyarakat kedua negara³².

2. Kunjungan kenegaraan, Perdana Menteri Bainimarama ke Indonesia, 5-6 April 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Fiji, 17-19 Juni 2014, Presiden Fiji, Ratu Epeli Nailatikau ke Indonesia, 26-29 Maret 2014.
3. Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Fiji pada saat mendampingi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan kenegaraan ke Fiji, 18 Juni 2014.
4. Pertemuan Tingkat Kepala Negara terakhir, Pertemuan bilateral Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri dan Presiden Fiji (PDIF ke 2 di Fiji Juni 2014).
5. Forum Bilateral, Policy Planning Dialogue/PPD ke-3 (antar Kementerian Luar Negeri November 2015).
6. Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri terakhir, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Fiji Ratu Inoke di Bali, 22 Maret 2016. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Fiji Ratu Inoke dalam JMC pertama RI-FIJI di Suva, 1 September 2015.
7. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Fiji Ratu Inoke dalam kunjungan resmi menteri luar negeri ke Nadi, 1 Maret 2016.

³² Ibid. Hal 34.

8. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Bambang Rantam Sariwanto, menerima kunjungan Duta Besar Fiji untuk Indonesia, Mr. S.T Cavuilati. Dalam kunjungan tersebut, Cavuilati menyampaikan dua hal yang menjadi perhatiannya, yaitu mengenai pemberlakuan resiprokal visa antara Fiji dengan Indonesia, dan pelatihan bidang pemasyarakatan bagi pegawai pemasyarakatan Fiji. Hal tersebut disampaikan oleh Cavuilati agar terjadi hubungan yang semakin baik dan saling menguntungkan antara Fiji dengan Indonesia.³³
 9. Menko Polhukam Luhut Pandjaitan pada tanggal 31 Maret 2016 dalam kunjungannya ke negara Fiji mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Josaia Bainimarama di kantor Perdana Menteri di Suva. Pada kesempatan ini, Menteri Luhut menyampaikan dukacita dari pemerintah RI kepada PM Bainimarama atas peristiwa topan Winston yang terjadi pada bulan lalu, yang menewaskan 19 orang dan menghancurkan sebagian negara tersebut.
 10. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut menyampaikan kepada PM Fiji pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan kepada negara itu sebesar lima (5) juta US dollar dan satu kompi zeni TNI yang akan membantu pembangunan kembali kerusakan di wilayah Queen Victoria. Setelah bertemu PM Bainimarama, Menko Luhut bertemu dengan Menteri Pertanian, Pemukiman, Maritim dan Penanggulangan Bencana, Ina Seruiratu.³⁴
- Pertemuan-pertemuan yang berlangsung mendapat respon yang positif. Fiji sangat mengharapkan bantuan Indonesia dalam untuk dapat mengembangkan pembangunan ekonomi negaranya. Prioritas hubungan luar negeri Indonesia etelah kawasan Asia Tenggara sudah pasti di kawasan pasifik

³³Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2016). *Kunjungan Duta Besar Fiji untuk Indonesia ke Kemenkumham*. Di akses <http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/741-kunjungan-duta-besar-fiji-untuk-indonesia-ke-kemenkumham>. tanggal 20 Juli 2016.

³⁴ Hery Saripudin, dkk. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik & Afrika Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Indonesia.(2013).*Op.cit*. Hal 34

selatan. Berbagai kunjungan, bantuan teknis non teknis, sumbangan alat penunjang kegiatan ekonomi bisa dijadikan tolak ukur keseriusan Indonesia dalam berhubungan dengan Fiji dan juga negara Pasifik Selatan lainnya. Peningkatan jumlah produk dari Indonesia yang masuk ke pasar Fiji juga telah bertambah, hal ini menjadi bukti rasa percaya dan *feedback* Fiji terhadap Indonesia.

Indonesia dan Papua Nugini mulai menjalin hubungan konsuler di tahun 1973, yang kemudian ditingkatkan menjadi hubungan diplomatic setelah Papua Nugini mendapatkan kemerdekaan dari Australi pada 16 september 1975. Secara umum, hubungan bilateral RI-Papua Nugini selama ini telah berjalan dengan baik. Indonesia menempatkan Papua Nugini sebagai negara yang penting karena mempunyai perbatasan langsung, secara darat maupun laut. Papua Nugini juga melihat Indonesia sebagai salah satu negara penting di kawasan yang dapat membantu Papua Nugini dalam menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara di Asia³⁵.

Di tahun 2013 Perdana Menteri Papua Nugini O'Neill ke Indonesia untuk melakukan pertemuan bilateral dengan presiden Sushilo Bambang Yudoyono. Selain penandatanganan kesepakatan kemitraan komprehensif, kedua negara juga menandatangani 11 nota kesepahaman atau MoU. Beberapa bidang yang dikerjsamakan meliputi hukum ekstradisi, batas wilayah, pemuda dan olahraga, energy dan pariwisata. Dengan disepakatinya kemitraan komprehensif beserta plan of action implementasinya, kedua negara memiliki

³⁵ Ibid.

peluang untuk mengembangkan kerjasama yang lebih luas di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya³⁶.

Kerjasama prioritas, sama halnya dengan Indonesia dan Fiji, dengan Papua Nugini ada pula concern kerjasama yang diutamakan kedua aktor ini diantaranya: pengelolaan perbatasan, penanganan kejahatan lintas-negara, pengembangan sumber energy mineral dan minyak, promosi people-to-people contacts dalam mengeratkan sesama etnis Melaneisa. Terdapat 54 dokumen (Agreement, Momerandum Of Understanding). Dalam forum bilateral, *Annual Leaders meeting (ALM)*, *Joint Ministerial Commision (JMC/SKB)*, *Joint Border Committee (JBC)*, *Border Liason Meeting (BLM)*³⁷.

Berikut adalah poin-poin pertemuan/ kunjungan masing-masing negara:

1. Pertemuan Tingkat Kepala Negara, Kunjungan kenegaraan Presiden RI Joko Widodo ke Papua Nugini, pada tanggal 11-12 mei 2015, Kehadiran pada pelantikan Presiden, RI dan kunjungan kehormatan PM Hon. Peter O'Neill dengan Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, 21 oktober 2014.
2. Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri, Pertemuan Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Marsudi Menteri Luar Negeri Papua Nugini Hon. Rimbink Pato di sela-sela AMM/ARF/EAS di Kuala Lumpur, 4 agustus 2015.

³⁶ Ibid. Hal 21

³⁷ Ibid. Hal 22

3. Pertemuan Menteri Luar Negeri RI-Menteri Luar Negeri Papua Nugini di Port Moresby, 11 mei 2015.
4. Pertemuan Menteri Luar Negeri RI-Menteri Luar Negeri Papua Nugini di sela-sela Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta, 19 april 2015.
5. Pertemuan Menteri Luar Negeri RI Retno -Menteri Luar Negeri Papua Nugini Hon. Rimbink Pato dalam kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Port Moresby, Papua Nugini, 27 februari 2015.

Di tahun 2015, Kunjungan ini merupakan kesempatan pertama kalinya Menlu Retno Marsudi ke Papua Nugini dan termasuk salah satu dari kunjungan bilateral resmi pertama yang dilakukan sejak dilantik pada bulan Oktober 2014. Hal ini merupakan cerminan dari kedekatan dan pentingnya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Papua Nugini, sekaligus juga merefleksikan komitmen tegas Indonesia untuk memperkuat hubungan, kerja sama, serta kontribusi bagi pembangunan di kawasan Pasifik.

Kedua Menteri mengakui kepentingan strategis yang ada dari hubungan khusus antara Indonesia dengan Papua Nugini, dengan memperhatikan lokasi geografis serta latar belakang dan warisan budaya Melanesia yang dimiliki oleh kedua negara. Kedua Menteri menekankan bahwa hubungan bilateral antara kedua negara didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati integritas teritorial.

Di dalam pertemuan telah dibicarakan cara dan upaya untuk lebih meningkatkan kerja sama antara Indonesia dengan Papua Nugini dalam kerangka Kemitraan Strategis yang disetujui di tahun 2013. Untuk itu, kedua Menlu telah menyetujui untuk meningkatkan upaya dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan yang telah disepakati pada Plan of Action tahun 2013, terutama di bidang kerja sama ekonomi, pemajuan konektivitas serta hubungan antar masyarakat (*people-to-people*), peningkatan manajemen perbatasan serta penguatan kerja sama di bidang peningkatan kapasitas dan bantuan teknis.

Kedua Menteri menekankan pentingnya mendorong upaya peningkatan perdagangan, termasuk di pasar perbatasan. Walaupun nilai perdagangan kedua negara pada tahun 2009 – 2013 telah bertumbuh sebesar 18,73%, kedua Menteri menggarisbawahi bahwa masih terdapat banyak kesempatan yang dapat diraih.

Untuk itu, mereka akan meningkatkan upaya untuk mendorong sektor swasta dalam melakukan perdagangan dan investasi lintas batas yang lebih besar di bidang hubungan antar masyarakat, kedua Menteri menyetujui untuk mendorong kerja sama di bidang kepemudaan dan olahraga, pendidikan, serta hubungan antar-budaya dan antar-masyarakat di daerah perbatasan. Mereka juga mendiskusikan upaya untuk meningkatkan pariwisata dan bisnis lintas batas melalui konektivitas yang lebih baik, antara lain dengan memajukan transportasi udara, infrastruktur jalan di daerah perbatasan serta fasilitas visa-on-arrival. Kedua negara ini menyambut baik rencana peresmian tugu

perbatasan Indonesia-Papua Nugini serta kantor *Border Development Agency* (BDA) di perbatasan Skouw-Wutung di tahun ini.

Menteri Luar Negeri RI Retno L.P Marsudi juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Papua Nugini, Hon. Peter O' Neill. Pada kesempatan tersebut, baik Perdana Menteri Papua Nugini maupun Menlu RI, menyepakati bahwa selama beberapa dekade ini, hubungan bilateral antara kedua negara telah semakin dalam dan dewasa, sehingga kedua pihak saat ini merasa yakin untuk membahas isu apapun secara terbuka dan jujur, termasuk isu-isu yang sensitif bagi kedua negara, tanpa menimbulkan dampak yang merugikan bagi keseluruhan hubungan kedua negara yang bertetangga dekat³⁸.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Vanuatu pada tahun 1980, namun hubungan diplomatik RI-Vanuatu baru terjalin setelah ditandatangani persetujuan pembukaan hubungan diplomatik pada tahun 1995³⁹. Hal penting dalam hubungan Indonesia-Vanuatu adalah *penandatanganan Joint Communique on the Occasion of the Visit of the Foreign Minister of The Republic of Vanuatu to Indonesia* oleh Menteri Luar Negeri hasan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Vanuatu Moana Carcasses 9 maret 2004⁴⁰.

³⁸Nouw Namukigiba. Timipotu News. (2015). Pernyataan Pers Menlu Ri di Port Moresby. Di akses <http://www.timipotu.com/2015/03/ini-hasil-pernyataan-pers-menlu-png.html>. tanggal 20 Juli 2016.

³⁹Hery Sarpudin,dkk. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik & Afrika Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. (2013). *Op. cit.* Hal 27

⁴⁰Ibid.

Dewasa kini, hubungan dan kerja sama bilateral kedua negara semakin meningkat. Sebagaimana ditandai dengan semakin intensifnya saling kunjung pada tingkat pemimpin dan pejabat tinggi kedua negara, serta dengan adanya kerangka kerjasama teknis dalam berbagai bidang.

Kepentingan utama Indonesia Sebagai mitra RI dalam mewujudkan kawasan Pasifik yang bersahabat, Membangun pemahaman antar-bangsa yang lebih baik Memperluas pasar bagi produk Indonesia. Fokus hubungan RI-Vanuatu, Kemananan Indonesia (keutuhan NKRI) Perdagangan dan investasi, serta mengeratkan *People-to-people contact* (etnis Melanesia)⁴¹.

Sebagaimana dinyatakan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), interaksi indonesia secara global diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan negara di segala bidang. Salah satu fondasi agar kelangsungan usaha pembangunan negara dapat terus berjalan adalah terciptanya suatu lingkungan yang aman dan damai. Baik dari kawasan sendiri maupun kawasan yang dekat secara geografis dengan wilayah negara tersebut.

Oleh karena itu, salah satu interaksi hubungan kerjasama bertujuan untuk melihat secara cermat dan kontinu setiap kehidupan/ perkembangan negara-negara yang letaknya dekat dengan negara terkait. Dalam hal ini, negara Indonesia apabila dilihat perkembangan yang terjadi bersifat negatif/ mengganggu kepentingan Indonesia, maka dengan segera harus diambil

⁴¹ Haidi, dkk. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik & Afrika.(2016). *Background Information Perkembangan Terkini Hubungan Bilateral RI-Vanuatu*. Dokumen Kementerian Luar Negeri vol 3.

kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan. Sebaliknya, jika dampak yang diberikan positif, harus pula mengambil sikap yang memanfaatkan bagi Indonesia.

Pasifik Selatan merupakan kawasan yang terdekat dengan wilayah Indonesia setelah kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini memiliki posisi yang cukup strategis bagi kepentingan nasional Indonesia, terutama dikaitkan dengan upaya menjaga keutuhan wilayah dan stabilitas nasional dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, kawasan ini memiliki potensi luas di bidang kelautan dan perikanan yang dapat dikembangkan. Sesuai dengan GBHN (Tap MPR No.II/1988) merupakan salah satu prioritas pelaksanaan politik luar negeri RI yang harus mendapatkan perhatian khusus⁴².

Stabilitas dan keamanan di wilayah yang terdekat dengan Indonesia penting artinya bagi Indonesia. Kedekatan geografis, kesamaan sumber daya alam, lingkungan hidup, serta etnis Papua/Melanesia yang juga banyak dihuni di Indonesia dan kawasan Pasifik Selatan tersebut menjadikan sebuah jembatan untuk membentuk sebuah kerjasama.

Kawasan ini justru mempunyai posisi strategis bagi upaya menjaga kedaulatan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedekatan Indonesia dengan negara-negara di kawasan menjadi modal utama

⁴² Syamsuddin Haris. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (1989). *Op. cit.* Hal 30

bagi upaya counter rongrongan gerakan *separatism* Papua dan dukungan sesama etnis papua/ Melanesia di beberapa negara kawasan Pasifik Selatan⁴³.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia juga bersambungan dengan ZEE negara-negara di kawasan pasifik selatan. Ini menjadi kesatuan zone ekologis (*ecozone*) yang kaya akan sumber daya hayati dan mineral yang mempunyai nilai ekonomis sekaligus strategis untuk pengembangan kerjasama di bidang ekonomi. Dilihat dari aspek ekonomi, berdasarkan data dan kerja sama yang terjalin pasifik selatan tidak menjanjikan pasar yang besar. Akan tetapi, kawasan tersebut merupakan ZEE yang sudah pasti memiliki potensi yang sangat besar, dilihat dari sektor perikanan dan kelautan, pertanian, hingga pariwisata. Dalam hal kepentingan Indonesia, terutama dalam hal kepentingan ketahanan pangan, ketahanan energy, dan pembangunan berkelanjutan⁴⁴.

Sekalipun jika melihat data hasil kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan beberapa negara di pasifik selatan, volume dan nilai ekonomi masih rendah terutama pada pengembangan pasar ekspor komoditi Indonesia, kehadiran produk ekspor Indonesia dapat dipandang sebagai representasi penerimaan dan kedekatan hubungan antar kedua negara. Sebab seperti yang diketahui negara-negara pasifik selatan lebih banyak mengimpor produk dari negara Amerika Serikat, Australia, New Zaeland, Jepang, dan Perancis⁴⁵.

Sejak tahun 1980 indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan di kawasan pasifik selatan. Ketegangan-ketegangan

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Haidi, dkk. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik & Afrika Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. (2013). *Op. cit.* Hal 3.

⁴⁵ Ibid.

hubungan yang pernah terjadi dengan Papua Nugini diselesaikan secara bertahap oleh Indonesia. Bantuan-bantuan terhadap konflik di Fiji, Vanuatu dan new Caledonia juga turut Indonesia mengambil peran⁴⁶.

Dalam gagasan *go east policy* yang dikembangkan oleh Indonesia prioritas melihat potensi Pasifik Selatan semakin terlihat jelas. Komitmen dalam mendukung kemajuan kawasan pasifik selatan juga terlihat dari dukungan Indonesia terhadap empat pilar pembangunan Pasifik selatan yakni *economic growth, sustainable development, good governance, and security*. Dukungan ini diturunkan menjadi kerja sama teknis yakni *capacity building* sebagai bagian dari implementasi wujud kebijakan luar negeri Indonesia terhadap hubungan dengan pasifik selatan.

Sebagai salah satu negara *Pacific Rim*, perkembangan situasi geopolitik pasifik selatan tentu akan mendapat perhatian khusus dari Indonesia. Pasifik selatan apabila memberikan sikap negatif ke Indonesia akan mengganggu proses pembangunan negara dan juga keamanan negara. Apalagi jika sikap negatif itu didukung oleh negara lain diluar Pasifik Selatan⁴⁷.

Masalah papua barat muncul lagi ke permukaan di tahun 1984. Sejak kembali bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah stabilitas kemandirian dan kesejahteraan masih terjadi hingga tahun ini. OPM (Organisasi Papua Merdeka) masih terus memperjuangkan keadilan untuk kesejahteraan warga papua barat. Isu separatism ini dari tahun ke tahun

⁴⁶ Drs. H. Zulkifli Hamid. (1996). *Op.cit.* Hal 104

⁴⁷ Syamsudin Haris. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (1989). *Op. cit.* Hal 42.

semakin berkembang pergerakannya. Meminta dukungan dari negara luar turut menjadi salah satu gerakan untuk memerdekakan diri dari Indonesia⁴⁸.

Isu separatisme di Papua Barat bersumber dari adanya perasaan termarginalisasi dan diskriminasi sebagian masyarakat Papua baik secara politik, ekonomi, maupun social budaya. Sebagian kelompok masyarakat ini kemudian mencoba mengangkat permasalahan-permasalahan tersebut diberbagai forum regional maupun internasional untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat internasional dengan tujuan memerdekakan diri dari Indonesia.

Isu Papua senantiasa menjadi perbincangan bahkan menjadi kendala hubungan Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Sebab seperti yang diketahui kesamaan etnis Melanesia yang banyak berhuni di masing-masing negara ini. (Fiji, Vanuatu, New Caledonia, Papua Nugini, Solomon Islands). Sedangkan di Indonesia juga memiliki penduduk yang dihuni oleh etnis Melanesia. Letaknya di bagian Indonesia Timur antara lain: Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat.

Dalam kebudayaan Melanesia, merupakan kelompok yang menganut *achieved status*. Konsep ini mengandung pengertian bahwa setiap orang memiliki peluang untuk mencapai status yang lebih tinggi. Orang Melanesia yang memiliki kekuasaan ekonomi biasanya juga dapat meraih kekuasaan politik, sekalipun hanya bersifat internal. Oleh karena itu, kebudayaan

⁴⁸ Ibid.

Melanesia lebih bersifat egaliter, yakni sederajat. Dalam artian Melanesia, masyarakat yang sama dan hidup demokratis⁴⁹.

Solidaritas yang kuat menjadi alasan utama beberapa negara di pasifik selatan mendukung kemerdekaan papua barat dari Indonesia. Para tokoh papua merdeka dan beberapa simpatisannya yang berada di pasifik selatan selalu menjalin kerja sama secara intens dalam melakukan dialog dengan pemerintah dan organisasi baik regional (Melanesian Spearhead Group) maupun internasional (PBB). Kampanye pendukung kemerdekaan papua belakangan ini semakin besar. Mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kebijakan otonomi khusus, serta referendum. Negara Fiji dan Papua Nugini dulunya mendukung untuk separatisme papua dari Indonesia.

Isu papua menimbulkan suatu citra yang melihat bahwa Indonesia adalah negara yang sering melakukan pelanggaran hak asasi manusia, tidak peduli terhadap ketimpangan yang terjadi di papua barat. Akhirnya citra Indonesia sebagai negara yang buruk membuat negara-negara khususnya di pasifik selatan enggan untuk bersikap bersahabat.

Masalah citra Indonesia di kawasan pasifik selatan harus ditindaklanjuti. Hal ini teut saja mengancam keutuhan NKRI dan hubungan dengan negara-negara lain. Maka dari itu, peluang dari fondasi dasar hubungan bilateral dengan beberapa negara di pasifik selatan bisa menjadi langkah awal untuk mengubah *mindset* mengenai Indonesia sebelumnya. Potensi-potensi seperti kedekatan geografis, kesamaan budaya serta kesamaan

⁴⁹ Syamsuddin Haris. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (1989). *Op. cit.* Hal 13.

sumber daya alam menjadi strategis Indonesia dalam menjalankan pembangunan serta kemandirian Indonesia.

Beberapa kerjasama bilateral yang saling menguntungkan seperti di bidang perikanan kelautan juga di bidang politik. Kesamaan ras Melanesia di Indonesia dengan negara-negara pasifik selatan juga merupakan peluang untuk meningkatkan *people to people contact* (masyarakat) Karena suara masyarakat di kawasan ini sangat dihargai maka Indonesia perlu mendekati dan membangun kepercayaan dari masyarakat mengenai citra Indonesia yang sebenarnya.

Melihat kondisi negara Indonesia yang semakin maju, kerjasama pembangunan atau bantuan kepada sesama negara-negara selatan terkhusus di Pasifik Selatan seharusnya juga semakin meningkat. Dengan melakukan kerjasama teknik, maka tujuan utama Indonesia agar tetap memiliki hubungan yang bersahabat dengan negara yang berdekatan dengan wilayah Indonesia (Pasifik Selatan).

Capacity building dan bantuan teknik untuk wilayah Pasifik Selatan memiliki tujuan yakni memajukan demokrasi, membantu dalam bidang perikanan, pertanian dan lain sebagainya, pelaksanaannya yaitu dengan pelatihan-pelatihan kepada sumber daya manusia. Seperti yang diketahui negara-negara di pasifik selatan kaya akan sumber daya alam. Akan tetapi, pengelolaan atau pemanfaatannya masih sangat minim. Hal ini disebabkan masih minimnya jumlah penduduk, akses transportasi yang sulit dijangkau serta kapasitas sumber daya manusia yang kurang. Stabilitas politik di Pasifik

Selatan pada pertengahan dekade 1980 mulai berkejang. Berbagai pergolakan politik seperti kudeta kepemimpinan di Fiji, pemberontakan di Papua Nugini, dan konflik internal pun masih menjadi dinamika keamanan dan stabilitas negara-negara Pasifik Selatan.

Potensi-potensi yang dimiliki oleh Pasifik Selatan menjadi perhatian beberapa negara. Salah satunya adalah negara Indonesia. Dalam sektor ekonomi, seperti sektor pariwisata, pertanian dan kelautan perikanan cukup berkembang dalam aktivitas perekonomian di beberapa negara Pasifik Selatan. Sedangkan dalam sektor politik ketidakstabilan internal beberapa negara Pasifik Selatan seperti kudeta kepemimpinan yang sering terjadi, minimnya pengetahuan mengenai sistematisasi parlemen menjadi peluang Indonesia untuk membantu meningkatkan kondisi tersebut dalam program *good governance*.

Jumlah negara di pasifik selatan sebanyak 22 (dua puluh dua) negara. Negara-negara ini masih sangat kurang dalam pembangunan dan juga stabilitas keamanan internal. Akan tetapi, terdapat tiga negara perkembangan proses pembangunan ekonomi negaranya yaitu negara Fiji, Papua Nugini, dan Vanuatu. Ketiga negara ini merupakan negara-negara yang tingkat ekonominya cukup berkembang dan pembangunan negara yang terus meningkat. Hubungan kerja sama dengan negara diluar pasifik selatan juga banyak terjalin. Ketiga negara ini juga merupakan negara-negara yang tidak begitu sulit dijangkau untuk masalah transportasi.

Bagi Indonesia, dari sisi kepentingan politik, ketiga negara ini berada dalam kunci kawasan pasifik selatan yang penting, ketiga negara ini

merupakan anggota organisasi regional sub Melanesia *Melanesian Spearhead Group (MSG)* dan *Pacific Islands Forum (PIF)* di mana isu solidaritas Papua menjadi salah satu agenda utamanya. Mereka juga merupakan negara-negara yang cukup berpengaruh dalam kawasan pasifik baik dari segi ekonomi maupun politik & social budaya. Pada tingkat hubungan ekonomi, selain Papua Nugini sebagai negara terbesar di Pasifik Selatan, Fiji dan Vanuatu juga memiliki hubungan ekonomi yang relative lebih banyak implementasinya.

Program *capacity building* yang menciptakan bantuan-bantuan dan pelatihan serta sumbangan Indonesia kepada ketiga negara ini juga telah banyak dilaksanakan. Di negara Fiji, pelatihan di bidang pengolahan biota laut dan pengolahn ikan sejak tahun 2010 telah banyak dilaksanakan oleh Indonesia. Pembanhgunan kapasitas sumber daya manusia di Fiji meningkat. Pemberian alat-alat di bidang pertanian juga mmemberikan potensi petani di Fiji untuk meningkatkan mata pencaharian mereka.

Di tahun 2015 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengirimkan tenaga ahli kerajinan kerang binaan dalam pelatihan kerajinan kerang yang dilaksanakan pada 8 hingga 12 September 2015 lalu di Fiji Museum, Suva. Hal ini ditujukan untuk memberdayakan masyarakat Fiji, khususnya wanita, di bidang kerajinan tangan.selama ini kerang yang ada di sepanjang pantai, belum diolah secara maksimal⁵⁰.

⁵⁰Indah N. Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia. (2015). *Kkp Kirim Tenaga Ahli Kerajinan Kerang Ke Fiji*. Di akses dari <http://kkp.go.id/index.php/berita/kkp-kirim-tenaga-ahli-kerajinan-kerang-ke-fiji/>. Tanggal 12 Mei 2016.

Dalam mengamati arti Indonesia bagi kawasan Pasifik Selatan, Pasifik Selatan merupakan suatu kawasan yang dulunya merupakan daerah jajahan negara Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Pada masa dekolonisasi berlangsung, Australia dan Selandia Baru menjadi dekat dengan negara-negara kecil di Pasifik Selatan. Proses dekolonisasi yang berlangsung di wilayah ini telah mulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dan meningkat pada awal tahun 1960-an. Proses ini telah melahirkan negara-negara baru. Dewasa ini di Pasifik Selatan 15 negara sudah memperoleh kemerdekaan.

Setiap negara-negara di Pasifik Selatan memiliki tantangan yang sama sebagai pulau kecil terpencil. wilayahnya yang berukuran kecil, dengan sumber daya alam terbatas, kapasitas sumber daya manusia yang minim, perekonomian berbasis secara sempit, jarak besar atau akses yang sulit dijangkau untuk pasar bebas (perdagangan), dan kerentanan terhadap bencana alam – menjadikan ini sebagai dinamika pengembangn pembangunan negara.

Sumber daya alam yang melimpah ruah di Pasifik Selatan menjadi kurang pemanfaatannya sebab kapasitas sumber daya manusia di pasifik selatan kurang mampu mengolah dan menjadikan sumber daya alam menjadi nilai ekonomis. Perekonomian negara-negara di Pasifik Selatan pada umumnya masih sangat bergantung dengan bekas negara penjajahnya. Negara amerika serikat, Perancis, dan Inggris. Negara besar seperti Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Australia juga turut menjadi tempat bergantung negara-negara pasfk selatan.

Hubungan kerja sama yang terjalin telah menciptakan ketergantungan yang besar bagi negara Pasifik selatan. Bantuan teknis, pemberian bantuan keuangan serta investasi yang besar menjadikan dalam sisi positif pasifik selatan meningkatkan pembangunan negaranya. Indonesia dewasa ini juga merupakan salah satu mitra kerja sama dengan negara-negara pasifik selatan.

Letak geografis yang strategis menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dengan segala macam jenis flora dan fauna serta potensi hidrografis dan deposit sumber alamnya yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi.

Sebagai Negara agraris, pertanian menjadi mata pencaharian terpenting bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Luas lahan pertanian lebih kurang 82, 71 % dari seluruh luas lahan. Lahan tersebut sebagian besar digunakan untuk areal persawahan. Sebagian besar budidaya perkebunan berupa tanaman tahunan.

Fakta fisik bahwa dua per tiga wilayah Indonesia berupa laut, maka sumber daya alam di laut memiliki potensi yang sangat besar. Selain mengandung minyak, gas, mineral dan energi laut non-konvensional, serta harta karun yang sudah mulai digali meskipun masih terbatas, laut juga menghasilkan ikan yang potensi lestariannya diperkirakan sebesar 6, 4 juta ton per tahun.

Saat ini yang baru dimanfaatkan sekitar 70 %. Pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan dikelompokkan dalam lima industri kelautan,

yaitu industri perikanan, industri mineral dan energi laut, industri maritim, termasuk industri galangan kapal, industri pelayaran (transportasi laut) dan industri pariwisata (wisata bahari dan kawasan konservasi). Saat ini yang menjadi andalan ekspor perikanan Indonesia adalah udang dan Tuna⁵¹.

⁵¹ Portal Nasional Republik Indonesi. (2015). *Potensi Sumber Daya Alam*. Di akses dari <http://www.indonesia.go.id/in/potensi-daerah/sumber-daya-alam>. Tanggal 15 Mei 2016

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang penulis telah paparkan pada pembahasan di bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan beserta saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam hubungan kerjasama bilateral, Indonesia mempunyai kepentingan yang sangat besar dalam membina kerjasama dengan negara-negara Pasifik Selatan. Terutama dengan negara Fiji, Papua Nugini, dan Vanuatu. Sebab, ketiga negara ini merupakan representative dalam tinjauan negara yang cukup berpengaruh di kawasannya, baik dari segi pertumbuhan ekonomi, keamanan pemerintahan, dan akses yang mudah dijangkau bagi negara diluar kawasan Pasifik Selatan.
2. Tujuan dari hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan pada dasarnya adalah berusaha mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terhadap dukungan negara-negara di Pasifik Selatan terkait isu separatism Papua Barat dari Indonesia. Seperti yang diketahui, etnis Melanesia yang banyak dihuni oleh negara-negara Pasifik Selatan memiliki rasa solidaritas yang kuat atas sesama etnis. Maka dari itu, sebagian dari pasifik selatan mendukung dan mengecam Indonesia tas beberapa tindakan yang

dianggap tidak memperdulikan kesejahteraan dan keamanan masyarakat Papua Barat. Melanesia merupakan suatu etnis yang kuat akan perjuangan kebahagiaan hidup dan rasa persaudaraan yang sederajat. Maka dari itu, atas nama solidaritas etnis Melanesia dan juga mereka melihat adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta ketidakpedulian pemerintah Indonesia terhadap kesejahteraan bagian wilayahnya sendiri (Papua Barat). Hal ini menjadi dinamika hubungan kedua aktor ini. Sebab isu ini sudah disuarakan dalam tingkat regional dan dunia internasional. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan berupa program Capacity Building dan Good Governance (bidang ekonomi dan politik) yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Indonesia juga memandang Pasifik Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang sama seperti di perikanan dan kelautan, pertanian yang dibingkai dalam kerjasama demi perkembangan kedua negara. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan seperti Fiji, Papua Nugini, dan Vanuatu memang masih terbatas dan seringkali tidak berjalan baik. Sulitnya akses ketiga negara dan minimnya jumlah penduduk menjadi kendala. Bagi Pasifik Selatan, Indonesia merupakan mitra kerjasama yang menguntungkan bagi mereka. Kesamaan sumber daya alam yang melimpah ruah, namun, pemanfaatannya bagi Pasifik Selatan sangat terbatas. Melalui kerjasama teknik (*capacity building*) yang diberikan

oleh Indonesia, kapasitas sumber daya manusia di negara-negara Pasifik Selatan meningkat. Mereka diajarkan pengeolahan, budidaya, dan diberikan pelatihan kerajinan tangan dengan memanfaatkan sumber daya alam (perikanan dan kelautan). hasilnya masyarakat di negara-negara Pasifik Selatan (khususnya Fiji, Papua Nugini, dan Vanuatu) semakin meningkat pengetahuan dan menjadikannya untuk aktivitas bernilai ekonomis.

B. SARAN-SARAN

1. Memperhatikan kondisi internal Papua Barat secara komprehensif agar tidak ada lagi gerakan-gerakan separatism Papua barat baik secara internal maupun internasional. Kebijakan yang tegas dan menyeluruh perlu dilakukan secepatnya dan Indonesia sudah seharusnya membantu penyelesaian konflik, masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Papua Barat.
2. Mengimplementasikan secara menyeluruh dan detail perjanjian/MoU yang telah ditandatangani antara Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Ada baiknya melibatkan aktor diluar pemerintah, seperti Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan komunitas dalam rangka pembangunan citra Indonesia di Pasifik Selatan.